



Proses pelebagaan PKB di era kepemimpinan Abdul Muhaimin Iskandar

Saman¹, Sri Budi Eko Wardani²

^{1,2} Universitas Indonesia

saman.ibnu.junaidi@gmail.com

Info Artikel :

Diterima :

10 Agustus 2023

Disetujui :

26 Agustus 2023

Dipublikasikan :

25 Agustus 2023

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai pelebagaan PKB di era kepemimpinan Abdul Muhaimin Iskandar. Sebagai partai politik yang identik dengan perjuangan Gus Dur, PKB telah menjadi partai politik yang unik dan menarik untuk diteliti lebih mendalam. Peneliti ingin melihat bagaimana PKB di era kepemimpinan Abdul Muhaimin Iskandar dari perspektif pelebagaan Partai Politik Randal dan Svasand dengan empat indikator yaitu (kesisteman organisasi, identitas nilai, otonomi kebijakan, dan reifikasi). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe studi kasus. Berdasarkan hasil temuan dan analisis menunjukkan bahwa PKB belum memiliki tingkat pelebagaan yang bagus, meskipun indikator pelebagaan menurut Randall & Svasand belum terpenuhi. Ditemukan bahwa PKB terindikasi sebagai partai komando yang masih mendapat intervensi dominan dari pusat, selain itu peran dominan dari seorang Abdul Muhaimin Iskandar juga menjadikan PKB sebagai "personalistic party". Sehingga disimpulkan bahwa pada Pemilu 2019 kemaren, proses kandidasi dapat dilakukan bukan karena pelebagaan partai yang sudah bagus akan tetapi lebih cenderung karena dampak dari keputusan DPP PKB. Basis pendukung PKB yang sebagian besar dari kalangan Nahdlatul Ulama secara tidak langsung menjadi sebuah keuntungan kompetitif (competitive advantage) bagi caleg-caleg atau pun kandidat yang diusung dalam pemilu.

Kata Kunci: PKB; Pelebagaan; Partai Politik; Pemilu

ABSTRACT

This study discusses about the institutionalization of PKB during the leadership era of Abdul Muhaimin Iskandar. As a political party that is identical with the Gus Dur's struggle. PKB has become a unique and interesting political party to be examine more closely. The researcher wants to see how PKB was in the era of Abdul Muhaimin Iskandar's leadership from the perspective of Randal and Svasand's political party institutionalization with four indicators, namely (organizational systems, value identity, policy autonomy, and reification). This study uses a qualitative method with a case study type. Based on the findings and analysis, it showed that PKB did not yet had a good level of institutionalization, even though according to Randall & Svasand the indicators of institutionalization had not been fulfilled. It was found that PKB was indicated as a command party that still received dominant intervention from the center, besides that the dominant role of Abdul Muhaimin Iskandar also made PKB a "personalistic party". So it was concluded that in the 2019 election yesterday, the candidacy process could be carried out not because of good party institutionalization but more likely because of the impact of the PKB DPP decision. PKB's support base, which was mostly from the Nahdlatul Ulama circle, indirectly becomes a competitive advantage for the candidates or candidates who was promoted in the election. PKB had become a unique and interesting political party to be examine more closely.

Keywords: PKB; institutionalization; Political parties; Election



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Reformasi 1998 menjadi sejarah baru dalam dinamika perpolitikan di Indonesia. Sebuah fase yang memberikan kebebasan politik yang lebih besar bagi seluruh rakyat Indonesia. Beberapa dekade sebelumnya kebebasan politik ini belum pernah ada. Sebelumnya, orde baru telah menjalankan pemerintahan represif yang sentralistik. Di era reformasi kini telah dibuka selebar-lebarnya kebebasan mendirikan partai politik sehingga nuansa politik bangsa sangat disesaki oleh aktivitas partai politik (Solikhin, 2017). Sebagai tuntutan organisasi yang modern partai politik dituntut untuk memiliki etika kepemimpinan yang demokratis dan kolegal, etika organisasi, dan etika pertanggungjawaban kepada masyarakat yang semuanya dilebagaikan dalam mekanisme internal partai yang disepakati bersama. Parpol menjadi jembatan penghubung politis antara pemilik

kekuasaan, yaitu rakyat, dengan pemerintah sebagai pemegang mandat kekuasaan. Selain itu fungsinya juga menjadi sentral dalam sebuah negara demokrasi (Harjanto, 2011). Hal ini menandakan perubahan penting yang dialami Indonesia dalam menjalankan proses demokratisasi adalah dengan munculnya berbagai macam partai politik.

Meskipun demikian, Lars Svasand (2019) menganggap bahwa munculnya berbagai macam partai politik tersebut harus diiringi oleh proses intitusionalisasi partai politik yang matang. Dalam buku yang berjudul *Institutionalisation of Political Parties: Comparative Case*, Lars Svasand menemukan partai politik yang sukses melakukan proses institusionalisasi di satu sisi dan partai politik yang gagal melakukannya di sisi yang lain. Menurut Lars Svasand, keberhasilan dan kegagalan kelembagaan partai politik dipengaruhi oleh berbedanya partai politik dalam menentukan sebuah kebijakan. Bahkan di antara partai politik yang sudah dapat disebut melembaga, tetapi masih masih banyak variasi mengenai dalam hal apa partai politik telah sukses dilembagakan. Artinya, fenomena politik kontemporer telah memberikan gambaran mengenai bagaimana proses pengambilan kebijakan dimulai dari mendorong partisipasi anggota dan kader partai atau malah sebaliknya keputusan politik hanya dilembagakan secara terpusat melalui segelintir pemimpin partai.

Dalam proses institusionalisasi partai politik, Huntington memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda dari apa yang sudah diungkapkan Lars Svasand. Ketika Lars Svasand lebih menekankan temuannya pada kegagalan partai politik dalam proses institusionalisasi akibat proses pengambilan kebijakan yang terpusat, Huntington lebih menekankan keberadaan kelompok kepentingan yang juga dapat menghambat proses institusionalisasi yang dilakukan oleh partai politik. Pandangan Lars Svasand dan Huntington sekilas memang memiliki kesamaan dalam memotret proses institusionalisasi partai politik yang sedang berlangsung. Namun, pada hakikatnya pandangan Lars Svasand dan Huntington mengenai institusionalisasi partai politik lebih bersifat saling melengkapi. Lars Svasand lebih berfokus memotret proses institusionalisasi partai politik melalui faktor internal seperti posisi pemimpin partai dalam pengambilan kebijakan. Sedangkan Huntington lebih berfokus pada fenomena-fenomena yang berada di luar partai politik, seperti keberadaan kelompok kepentingan. Levitsky (1998) juga memiliki pandangan mengenai proses institusionalisasi yang sedang berlangsung di sejumlah partai politik. Pada pandangan mengenai institusionalisasi partai politik, Levitsky memotret dua dimensi yang bersifat penting dan tidak dapat dielakkan. Dua dimensi tersebut adalah dimensi nilai dan pola tingkah laku. Bagi Levitsky proses internalisasi nilai dapat dikatakan berhasil ketika nilai dapat diwujudkan dalam pikiran publik. Levitsky memberikan contoh melalui bagaimana pemimpin dan anggota partai dapat berkomitmen dan berperilaku sebagaimana nilai-nilai yang sudah diperjuangkan.

Sementara itu, dalam konteks politik Indonesia beberapa studi tentang partai juga menunjukkan bahwa proses pelembagaan partai politik masih lemah (Romli, 2016). Hal ini disebabkan oleh kekuatan figur yang terlalu sering dijadikan tolak ukur dalam pemilu. Apalagi saat ini, biaya politik di Indonesia termasuk kategori sangat tinggi; implikasinya adalah adanya kepedulian terhadap proses konsolidasi demokrasi. Tingginya biaya politik tidak terlepas dari rendahnya partai akibat kegagalan fungsi agregatif kepentingan yang ditunjukkan oleh partai politik (Muhtadi, 2013). Dengan berbagai fungsi penting tersebut, partai politik sebagai pilar demokrasi harus mampu membentuk forum atau lembaga ideal yang dapat mendukung berjalannya demokrasi yang ideal dan berkelanjutan. Huntington juga menyampaikan konsep serupa bahwa salah satu indikator utama menuju demokrasi yang terkonsolidasi membutuhkan lembaga partai politik dan pemilu sebagai esensi demokrasi.

Secara umum ada beberapa permasalahan penting yang nampak dalam dalam proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai-partai politik di Indonesia. Studi ini mencatat dan mencoba melakukan kategorisasi dari beberapa permasalahan tersebut, diantaranya adalah rekrutmen yang bersifat instan. Dalam hal ini PKB melakukan rekrutmen yang bersifat instan, terutama dengan menggaet kalangan tertentu, khususnya public figure seperti artis, pejabat/mantan pejabat, dan kalangan pengusaha hingga entertainer. Ada berbagai alasan yang melatarbelakangi kebijakan partai politik melakukan merekrut instan. Rekrutmen terhadap kalangan public figure, entertainer untuk menjadi calon anggota legislatif atau calon kepala daerah didasarkan pada pertimbangan bahwa dengan popularitas pribadi yang dimilikinya mereka dianggap lebih mudah untuk dikenal oleh pemilih, terutama dari masyarakat awam. Tingkat pengenalan publik yang tinggi ini diharapkan dapat memperbesar peluang kandidat untuk terpilih.

Dengan demikian, rekrutmen instan semacam ini menjadi permasalahan yang seringkali dihadapi partai politik di Indonesia tak terkecuali dengan PKB. Rekrutmen secara instan disebut sebagai salah satu masalah disebabkan langkah tersebut tidak membantu partai dalam meningkatkan kinerjanya di dalam pengambilan kebijakan publik. Beberapa entertainer yang terpilih dalam pemilu legislatif nampak tidak banyak terlihat sepak terjangnya sebagai seorang wakil rakyat. Di sisi lain, rekrutmen semacam ini juga semakin mempersempit jalur masuk bagi kader-kader partai yang berjuang dari bawah yang secara sederhana dianggap memiliki pengenalan yang lebih dalam terhadap ideologi partai. Adapun artis yang direkrut PKB pada pileg 2019, salah satunya adalah Arzeti Bilbina dan Tommy Kurniawan.

Dari sejumlah masalah tersebut, system rekrutmen, orientasi dan desain kaderisasi kaderisasi lebih cenderung dilakukan dalam rangka mendapatkan suara dari masyarakat dan memenangkan pemilu. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, PKB terlihat tidak memiliki orientasi, kriteria, dan metode yang jelas karena PKB tampaknya terlalu fokus pada kebutuhan jangka pendek, yaitu kemenangan pemilu dan kurang memberikan perhatian pada kebutuhan partai jangka panjang, khususnya pengembangan anggota dan penguatan ideology. Dapat dibayangkan jika partai politik sebagai sumber pemimpin nasional tidak memiliki pola rekrutmen dan mekanisme kaderisasi yang baik, tentu ini akan memunculkan berbagai persoalan, yang salah satunya ditunjukkan dengan adanya politik kekerabatan. Tumbuh dan berkembangnya politik kekerabatan memunculkan sejumlah ketimpangan karena politik kekerabatan menutup akses bagi orang-orang yang memiliki sumberdaya yang terbatas dan tidak memiliki hubungan kekerabatan untuk dapat menjabat di posisi-posisi politik. Sedangkan bagi mereka yang memiliki hubungan, sudah dipastikan calon tersebut dapat mengakumulasi pengaruh, kekayaan dan juga penguasaan wilayah. Jika suatu wilayah telah dikuasai oleh sekelompok elit bahkan dari keluarga yang sama, maka sumberdaya daerah tersebut akan dikuasai oleh mereka. Dapat dipastikan bahwa kekuatan utama berada pada segelintir elit sehingga jalan kepentingannya pun tidak menutup kemungkinan hanyalah untuk kepentingan para elit, bukan untuk kebaikan bersama.

Meskipun masih terdapat sejumlah masalah, namun bukan berarti PKB tidak memiliki prestasi yang baik dalam kancah politik di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa hal, salah satunya adalah ketua umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar yang dinobatkan sebagai pimpinan DPR RI yang paling aspiratif di urutan pertama pada tahun 2021. Selain itu, prestasi PKB di bawah kepemimpinan Abdul Muhaimin Iskandar ini juga diklaim telah melampaui prestasi PKB di bawah kepemimpinan Abdurrehman Wahid. Di era Abdul Muhaimin Iskandar PKB pernah meraih kursi sebanyak 58 di parlemen. Sedangkan di era Abdurrahman Wahid, PKB pernah menjadapat perolehan tertinggi di parlemen yaitu sebanyak 52 kursi. Artinya, capaian di era Abdul Muhaimin Iskandar PKB menjelma menjadi partai politik yang lebih baik dan terbuka untuk semua kalangan. Sesuai dengan judul proposal tesis, penulis akan lebih banyak dan mendiskusikan secara detail mengenai kerangka penguatan ideology, system rekrutmen, serta orientasi dan desain kaderisasi PKB di era kepemimpinan Abdul Muhaimin Iskandar pada tahun 2005-2022.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini adalah kualitatif. Metode kualitatif memiliki keunggulan dalam melihat suatu gejala sosial secara mendalam, mengamati prosesnya, lalu menarik kesimpulan. Penelitian kualitatif memang berfokus pada proses daripada hasil atau produk. (19994) Maka penelitian kualitatif bertumpu pada pengumpulan data primer yang utamanya diperoleh melalui wawancara dengan narasumber atau informan kunci. Metode kualitatif juga dipilih karena kemampuannya dalam membangun masalah dari teori yang digunakan. Penelitian ini berpijak pada keinginan untuk membangun sebuah pemikiran tentang pelembagaan partai politik, terutama dalam konteks kaderisasi dan rekrutmen kader politik yang dilakukan oleh PKB. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, proses pelembagaan yang terjadi di PKB memiliki kecenderungan yang unik. Di satu sisi, PKB seringkali diidentikkan dengan ketokohan Abdul Muhaimin Iskandar. Di sisi yang lain, PKB dalam pembuatan kebijakan krusial partai sering melakukan musyarah terlebih dahulu dengan tokoh-tokoh di PBNU.

Data dikumpulkan dengan dua cara. Pertama adalah melakukan studi pustaka dan analisis isi atas berbagai literatur dan pemberitaan di media cetak yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Media cetak yang umumnya dijadikan objek penelitian adalah koran nasional ataupun

lokal. Kedua adalah melakukan wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang berkaitan dan memiliki informasi terkait dengan permasalahan penelitian. Narasumber yang diwawancarai adalah para pengurus partai-partai politik yang terlibat dalam kaderisasi dan rekrutmen kader politik di dalam tubuh PKB.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelebagaan Partai Politik

Partai politik masih mengalami masalah serius dari sisi kelembagaan. Dalam konteks ini, Lili Romli (2011) telah membagi paling tidak ada tiga masalah terkait masalah kelembagaan partai politik. ketiga masalah tersebut yaitu ideology dan platform, kohesivitas dan manajemen konflik serta rekrutmen dan kaderisasi partai politik. menurut Lili Romli, ideology merupakan system nilai yang masih bersifat abstrak dan perlu ada penjabaran lebih lanjut. Ideology yang dianut oleh partai politik perlu diterjemahkan ke dalam hal-hal yang bersifat riil dan langsung dirasakan oleh masyarakat. Dengan cara ini akan membantu masyarakat dalam memahami dan mengerti tentang ideology yang dianut oleh suatu partai politik. cara untuk menerjemahkan ideology yang dimiliki partai politik dapat dirumuskan dalam bentuk platform partai politik. platform partai politik berisikan panduan umum dan garis besar arah kebijakan partai dalam kontribusinya terhadap permasalahan bangsa dan Negara. platform partai merupakan kerangka acuan dasar untuk menyusun program kerja dan isu perjuangan dalam politik.

Sementara itu, kohesivitas dan manajemen konflik merupakan penjelasan tentang konflik yang sering terjadi di partai politik. Menurut temuan Lili Romli, pada umumnya konflik di dalam tubuh partai politik yang satu dengan yang lainnya tidak jauh berbeda. Sejumlah konflik partai politik yang pernah diberitakan di media massa di antaranya adalah konflik antar faksi, konflik pada kongres partai baik di tingkat kota/kabupaten, provinsi ataupun nasional. Selain itu juga terdapat konflik personal antar pengurus dan konflik antar tingkat kepengurusan yang bersifat vertical dan horizontal. Terakhir, masalah yang sering terjadi pada pelembagaan partai politik adalah pola rekrutmen dan kaderisasi politik. kaderisasi dan pendidikan politik dilakukan oleh partai politik dalam rangka untuk mencetak pemimpin. Oleh karena itu, partai politik yang terlembaga akan melakukan pendidikan politik dan pelatihan kepemimpinan secara regular.

Studi Firman Noor (2012) telah menjelaskan kondisi kepartaian 14 Tahun reformasi dengan menggunakan perspektif pelembagaan sistem kepartaian. Menurut Firman Noor, persoalan konsistensi perilaku partai dalam melihat aturan main dapat dikatakan bahwa sebagian besar partai masih cukup bermasalah. Masih adanya kelompok oligarki di dalam partai di sekitar ketua umum yang menentukan kebijakan partai merupakan kecenderungan yang kerap tak terelakkan dan menjadi indikasi bahwa aturan main partai kerap diabaikan dan dilewati dengan kepentingan segelintir elite partai. Beberapa partai yang diidentikkan dengan sosok atau figur tertentu menjadi partai yang berpotensi besar untuk memperlakukan aturan main partai menjadi *secondary sources* dalam konteks pembuatan kebijakan. Demikian sentralnya peran partai ini, pimpinan partai dapat dengan mudah melakukan manuver atau gerakan partai tanpa harus melalui prosedur yang telah ditetapkan. PDIP, misalnya, telah demikian kuat bergantung pada ketokohan ketimbang sistem. Penghormatan yang demikian besar kepada sosok Megawati sebagai bagian dari trah Bung Karno telah menempatkannya demikian utama dan sangat menentukan dalam partai ini. Kebijakan-kebijakan partai kerap ditetapkan olehnya dengan pertimbangan yang hanya melibatkan segelintir orang. Hal ini berimbas, misalnya, dengan keputusan DPP PDIP yang mampu menganulir keputusan pengurus partai di tingkat lokal dalam menentukan siapa yang berhak untuk maju dalam pilkada. Fenomena ini terjadi, misalnya, dalam kasus PDIP saat DPP memutuskan mendukung Sutiyoso untuk kembali menjadi Gubernur DKI periode 2002–2007, dan PKB saat DPP menetapkan Abdul Kahfi sebagai kandidat gubernur dalam pemilihan gubernur Jawa Timur (2003). Tidak jarang hal ini menimbulkan kekecewaan yang mendalam. Namun, kader harus bisa menerima kenyataan itu. Kedudukan Megawati yang demikian sempurna dan tak tersentuh (*untouchables*) menyebabkan dirinya nyaris dikultuskan sehingga kalangan yang mencoba untuk mendemokratiskan partai dan menumbuhkan budaya yang lebih rasional dan impersonal justru tersingkirkan. Di samping itu, keretakan partai atau munculnya kepengurusan kembar setelah mencuatnya sebuah konflik mengindikasikan bahwa persoalan resolusi konflik belum benar-benar tertata dan jauh dari terlembaga dalam sebagian besar partai. Penyelesaian konflik biasanya dilakukan

melalui jalur-jalur personal ataupun informal yang tidak otoritatif. Sayangnya, hal itu tidak cukup memuaskan pihak-pihak yang terkait. Tiap-tiap pihak akhirnya tetap merasa sebagai pihak yang benar dan keretakan partai pun menjadi tak terhindarkan.

Dari sisi ideologi partai politik di era reformasi, menurut Firman Noor (2015) ideologi partai politik telah mengalami penurunan. Dalam konteks pemilu legislatif, masyarakat didekati oleh partai-partai yang ada saat ini yang lazim menggunakan pendekatan yang bersifat pragmatis. Simbol-simbol ideologis tetap ada, namun sudah semakin minim. Sistem proporsional terbuka yang mengharuskan kandidat untuk mendekati masyarakat secara langsung, makin menguatkan kenyataan ini. Banyak calon legislatif (caleg) yang menyadari bahwa mereka kurang dikenal kemudian menggunakan cara cepat untuk dapat terkenal dan menarik perhatian masyarakat. Misalnya, memberikan sesuatu yang konkret kepada masyarakat, seperti pemberian kebutuhan bahan pokok, melakukan kegiatan sosial yang sifatnya gratis, pembagian hadiah melalui kegiatan amal atau kompetisi olah raga, mengadakan pertunjukan hiburan rakyat, bahkan ada pula yang langsung memberikan uang kepada masyarakat. Dalam beberapa kasus pertunjukan hiburan rakyat, yang biasanya menghadirkan penyanyi dangdut dan pelawak, menjadi ajang bagi-bagi uang. Pola pendekatan seperti itu, dapat menyebabkan nuansa politik uang demikian menggejala. Beberapa lembaga seperti Indonesian Corruption Watch (ICW), misalnya, mencatat bahwa pada Pemilu 2009, caleg merupakan aktor utama (82%) dari pelaku politik uang dalam pengertian membeli suara (*vote buying*). Meski partai secara formal telah mengingatkan agar para caleg dapat menjaga pendekatan pragmatis yang tidak berlebihan, namun tidak semua caleg mematuhi. Salah seorang caleg yang berhasil diwawancara menjelang pemilu mengaku bahwa meski hal itu berarti melanggar aturan partai, dia tidak dapat mengelak melakukan kegiatan semacam pembagian sembako. Hal ini karena menurutnya masyarakat tampak berharap bahwa para caleg dapat memberikan sesuatu yang kongkret, tidak sekadar janji, kepada mereka.

Cerminan dari tidak bekerjanya ideologi juga terlihat dari rendahnya loyalitas konstituen kepada partai, sementara volatilitas (ketidakloyalan) kepada partai demikian tinggi. Tercermin dari fluktuasi perolehan suara partai-partai yang cukup tinggi antara satu pemilu ke pemilu lain. Adanya ideologisasi yang benar akan menyebabkan tumbuhnya loyalitas dalam berpolitik. Orang tidak akan mudah dimobilisasi atau berpindah partai karena ada ikatan ideologis yang kuat terhadap partainya. Sayangnya, ideologisasi itu tidak berjalan di kebanyakan partai, seiring dengan tersendatnya proses kaderisasi. Volatilitas tinggi ini kemudian kurang memotivasi partai-partai untuk bekerja lebih keras lagi. Alih-alih bekerja dengan sungguh-sungguh, mereka cenderung semakin menahan diri, untuk kemudian mendekati masyarakat tepat di detik-detik akhir menjelang pencoblosan melalui serangan fajar. Sikap ini justru pada gilirannya menyuburkan pragmatisme dan yang terpenting ketidakdekatan masyarakat pada partai, yang pada akhirnya makin menguatkan volatilitas. Lingkaran setanpun tidak dapat dihindari.

Pada studinya yang lain yang berjudul kegagalan PKB dalam pelebagaan *shared values* dan dampaknya, Firman Noor (2015) juga telah mengungkap bagaimana PKB dalam memperkuat pelebagaan partainya. Menurut studi tersebut, kegagalan PKB dalam melebagaikan *shared values* pada rentang waktu dekade pertama reformasi memiliki dampak yang serius bagi keberadaan partai ini. Kegagalan ini disebabkan oleh beberapa hal, yakni hadirnya *shared values* yang terlalu umum dan lemahnya komitmen membangun *shared values* yang dapat dijadikan *working ideology* dan identitas kolektif. Selain itu, peran serta lembaga lain di luar partai dalam proses pembentukan dan penyebaran *shared values* justru cenderung mengacaukan proses ini. Ada tiga dampak dari lemahnya keberadaan *shared values* dalam PKB, terciptanya faksi-faksi atau pengelompokan atas dasar pragmatisme, tumbuhnya loyalitas kepada tokoh dan bukan partai, dan munculnya gradasi pemahaman atas ideologi. Ketiga hal itulah yang pada akhirnya menjadi penyebab bagi sulit terbangunnya soliditas dalam Partai Kebangkitan Bangsa. Dalam temuan Firman Noor, pada era dekade pertama reformasi kaderisasi di PKB yang semestinya dijadikan sebagai media sosialisasi *shared values* atau ideologisasi, namun kenyataannya malah lebih difokuskan pada persoalan kemenangan pemilu atau pilkada, atau pada persoalan peningkatan pemahaman kebangsaan dan bagaimana mengimplementasikan hal itu dalam konteks hubungan partai dengan kalangan lain di luar partai (eksternal). Dan seiring dengan proses kaderisasi yang berjalan lambat dan tersendatsendat, persoalan ideologisasi internal ini tidak berlangsung secara kontinu dan konsisten. Hal ini dapat dilihat, misalnya, dengan tidak ditemukan jadwal dan pentahapan sistematis yang terkait dengan pematapan

ideologisasi dalam konteks internal dalam partai ini. Begitu pula turunan-turunan ideologis yang mengatur tingkah organisasi dan anggota partai tidak tergarap secara sistematis.

Sejalan dengan temuan Firman Noor, Aprista Ristiyawati (2019) menjelaskan Pasca reformasi, kehidupan partai politik di Indonesia menunjukkan dinamika kelembagaan yang masih memerlukan pembenahan. Secara garis besar, berbagai problem partai politik yang ada di Indonesia ini utamanya adalah masalah pada ideologi partai. Hal tersebut dapat terlihat dari tingkah laku para elitnya yang cenderung bersikap pragmatis yang akhirnya menggiring partai untuk melakukan politik kartel. Politik kartel adalah kondisi politik dimana banyak partai politik bermetafora memainkan konsep ekonomi dalam kehidupan berpolitik. Perdebatan ideologi, gagasan, dan visi misi bukan lagi menjadi tolak ukur. Satu-satunya yang menjadi tolak ukur adalah kepentingan. Model partai kartel kerap kali tumbuh mengikuti modernisasi dan birokratisasi masyarakat. Perluasan pasar politik, pada satu sisi, dan munculnya agenda sosial baru berpusat pada isu-isu politik baru, pada sisi lain, melemahkan afiliasi pemilih terhadap partai tradisional. Ciri dari partai yang sudah terkartelisasi dapat dipastikan bahwa perilaku partai politik di Indonesia cenderung ke arah perilaku yang terkartelisasi, yang berarti bahwa ideologi dan program partai dinomorsekiankan dan dikalahkan oleh kepentingan yang pragmatis. Menurut Aprista Ristiyawati pelembagaan partai politik di Indonesia masih memiliki sejumlah masalah. Salah satu masalah yang paling terlihat adalah ideologi partai politik yang semakin melemah. Selain itu, masalah lainnya adalah sistem pengadministrasian dan rekrutmen pola kaderisasi anggota partai politik yang kurang berkualitas serta partai politik kerap kali mengalami krisis dalam hal pengumpulan dana atau Fundraising.

Dari pemetaan di atas, pada dasarnya argumen yang ditemukan adalah masih maraknya masalah yang dialami partai politik dalam prosesnya memperkuat pelembagaan dan institusionalisasi partai politik. Seperti penjelasan yang sudah dijelaskan di atas oleh Lili Romli (2011), Firman Noor (2012 dan 2014), Aprista Ristiyawati (2019). Dari argumen literatur di atas juga telah ada kajian yang mengulas tema mengenai PKB dan Kegagalan Pelembagaan *Shared Values* dan Dampaknya oleh Firman Noor (2015). Namun dalam kajian literatur tersebut, Firman Noor kurang menjelaskan secara spesifik mengenai kaderisasi yang menjadi elemen penting dalam pelembagaan yang dilakukan PKB. oleh karena itu, penelitian yang berjudul proses pelembagaan PKB di era Muhaimin Iskandar perlu dilakukan.

Proses Pelembagaan PKB era Abdul Muhaimin Iskandar

Berikut adalah hasil pembahasan terkait pelembagaan PKB di era Abdul Muhaimin Iskandar sebagai partai islam terbesar di Indonesia. Berdasarkan indikator pelembagaan partai politik menurut Vicky Randall dan Lars Svasand: 1) Kesisteman Organisasi (Systemness) Pada bagian aspek kesisteman organisasi ini terdapat hal-hal yang sudah sesuai dengan indikator terlembaganya sebuah partai politik dan ada pula hal-hal yang masih belum tercapai oleh PKB menurut aspek tersebut. Indikator-indikator yang hampir tercapai ini adalah yang pertama dari segi manajemen SDM termasuk di dalamnya proses rekrutmen anggota serta proses seleksi bakal calon legislatif yang sudah terlaksana sesuai dengan panduan AD/ART. Kemudian untuk kejelasan sumber keuangan PKB juga telah transparan diungkapkan, lalu yang terakhir partai ini juga telah memiliki sistem manajemen konflik yang di dasarkan atas nilai-nilai demokrasi serta adanya dewan syura partai yang bertugas menangani konflik. Lalu hal-hal yang menurut analisis peneliti belum sejalan dengan indikator-indikator pelembagaan partai adalah terletak pada bagian kepemimpinan partai di daerah yang masih lemah, hal ini dikarenakan ketergantungan partai terhadap putusan pusat yang sifatnya mengikat, sehingga peneliti mengatakan bahwa PKB di era Abdul Muhaimin Iskandar sebagai “partai komando”. Kuatnya intervensi pusat juga melemahkan kepemimpinan partai karena pemimpin partai sepenuhnya mengikuti keputusan-keputusan pusat terkait proses pengelolaan partai. 2) Identitas Nilai (Value infusion) Untuk basis pendukungnya sendiri PKB dalam pergerakannya sehari-hari memiliki interaksi yang kuat dengan kelompok pedagang, petani dan nelayan yang menjadi basis pendukung utama PKB. Walaupun menjalin interaksi yang intensif dengan kelompok pedagang, petani dan nelayan akan tetapi peneliti tidak menemukan data lain yang memperkuat asumsi bahwa kelompok ini menyatakan dukungan penuh mereka kepada PKB. Sehingga pengakaran partai ini ditengah masyarakat masih dipertanyakan. Sedangkan untuk proses internalisasi nilai-nilai kepartaian kepada anggotanya sendiri PKB juga telah memiliki sistem kaderisasi yang bersifat kontinue/berkelanjutan baik itu di tingkat daerah (dalam hal ini DPC dan DPW) maupun di tingkat pusat.

Sedangkan untuk indikator yang belum tercapai oleh PKB pada aspek identitas nilai ini adalah masih besarnya peluang untuk terjadinya klientalisme dalam internal partai, serta loyalitas anggota partai masih belum kuat sebab balik lagi bahwa partai ini adalah partai komando yang bergantung pada ketetapan pusat. Sehingga loby-loby politik untuk kepentingan pribadi masih mungkin terjadi, dan yang terakhir adalah masih besarnya pemanfaatan simbol-simbol ketokohan dalam rangka penetrasi di tengah masyarakat, sehingga menjadikan PKB memiliki ketergantungan pada seorang tokoh sentral seperti Abdul Muhaimin Iskandar. 3) Otonomi Kebijakan (Decisional Autonomy) Pada bagian otonomi kebijakan ini peneliti melihat masih banyak indikator-indikator yang belum terpenuhi oleh PKB. Hal ini dikarenakan dampak dari sistem komando yang berjalan dalam tubuh PKB sehingga akhirnya juga berbuntut bagi partai-partai yang berkedudukan di daerah. Dampak-dampak dari sistem komando ini terlihat dari ketergantungan partai terhadap putusan pusat sehingga partai di daerah tidak mandiri dalam menjalankan organisasinya. Sedangkan Randall dan Svasand menekankan bahwa partai harus mandiri dan terbebas dari oligarki elite dalam menjalankan organisasi mereka. Hal ini meliputi pengambilan keputusan serta kebijakan-kebijakan internal yang seharusnya menjadi hak struktural PKB itu sendiri. Sekalipun pada aspek otonomi kebijakan ini PKB memiliki banyak kekurangan tetapi ada indikator yang juga hampir terpenuhi, yaitu hubungan yang di jalin partai dengan aktor luar tidak serta merta mempengaruhi keputusan internal partai, disini terlihat bahwa PKB berusaha menjadi sebuah organisasi yang independen. 4) Reifikasi (Reification) Sedangkan pada aspek reifikasi PKB telah memiliki berbagai kegiatan dalam rangka memposisikan dan membranding dirinya sebagai organisasi yang bernilai positif di tengah masyarakat. Hal ini terlihat dengan keaktifan PKB untuk terlibat dalam aksi kemanusiaan dan juga menjalankan fungsinya sebagai penghimpun aspirasi masyarakat. Akan tetapi di sini PKB juga masih minus dalam hal implementasi platform partai, dimana PKB masih membranding dirinya dengan simbol-simbol ketokohan Abdul Muhaimin Iskandar sebagai nilai jual utama. Dalam aspek kesisteman dikatakan partai yang memiliki ketergantungan kepada aktor tertentu atau biasa disebut dengan partai personalistik memiliki tingkat pelebagaan yang lemah. Berdasarkan keempat indikator pelebagaan partai politik yang telah dijelaskan sebelumnya terdapat beberapa poin yang peneliti garis bawahi terkait pelebagaan yang dimiliki PKB.

Pertama, PKB dalam proses penentuan kebijakan-kebijakan strategis dalam internal kepartaian masih terdapat intervensi yang cukup kuat dari pusat, sehingga mengindikasikan bahwa PKB sebagai "Partai Komando". Keputusan penting yang diambil beserta haluan pergerakan partai semuanya bersumber pada ketetapan-ketetapan dari pusat. Sehingga PKB yang berkedudukan ditingkat DPC dalam menjalankan organisasinya berpedoman atas komando pusat, apabila pusat telah memutuskan maka struktural partai dibawahnya harus tunduk dengan keputusan ini. Adanya intervensi yang terlalu dalam dari struktural partai yang lebih tinggi dalam hal penentuan kebijakan-kebijakan sentral dalam internal PKB ini terlihat sangat jelas dalam penunjukan orang-orang yang akan mengisi jabatan strategis dalam partai. Seperti halnya dalam penunjukan untuk jabatan ketua DPC, DPD maupun jabatan untuk calon pasangan yang diusung dalam pemilu.

Selanjutnya, poin kedua yang menjadi sorotan peneliti dalam pelebagaan PKB adalah besarnya peran ketokohan seorang Abdul Muhaimin Iskandar, anak dari cucu pendiri Nahdlatul Ulama sebagai mesin politik utama PKB serta memiliki andil yang besar dalam menentukan garis besar haluan Partai. Peneliti berpendapat bahwa PKB adalah partai personalistik, yakni tipe partai politik yang cenderung merepresentasikan seorang tokoh sentral sebagai mesin politik utama partai. Apabila berbicara mengenai pelebagaan partai politik partai dengan ciri-ciri seperti ini biasanya memiliki tingkat pelebagaan yang rendah karena partai memiliki kecenderungan untuk menjalankan organisasinya dengan tujuan mengakomodasi kepentingan tokoh tersebut.

Besarnya andil Abdul Muhaimin Iskandar dalam menentukan haluan partai juga berlaku sama bagi partai yang berkedudukan di daerah baik itu tingkat DPW maupun DPC. Ideologi kepartaian dalam tubuh PKB banyak bersumber dari sosok Abdul Muhaimin Iskandar yang kental dengan jiwa yang memperjuangkan "kaum mustadz'afin" sebagaimana perjuangan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), salah satunya yaitu sistem komando yang telah dibahas sebelumnya. Ketergantungan PKB terhadap tokoh Abdul Muhaimin Iskandar di satu sisi memang mengindikasikan bahwa PKB belum memiliki tingkat pelebagaan yang baik. Akan tetapi di sisi lain ketokohan seorang Abdul Muhaimin Iskandar ini juga menjadi keuntungan tersendiri bagi caleg-caleg dan calon yang diusung dalam pilkada. Ketokohan Abdul Muhaimin Iskandar menjadi keuntungan kompetitif bagi mereka sebab

caleg-caleg dan calon kandidat dalam pilkada, karena ini akan lebih mudah dalam melakukan penetrasi di tengah masyarakat dengan memanfaatkan simbol-simbol partai dan juga ketokohan Abdul Muhaimin Iskandar ini. Akan tetapi tetap saja bila dilihat dari aspek pelebagaan partai politik ketergantungan sebuah partai terhadap tokoh tertentu bukanlah hal positif, sebab popularitas tokoh tersebut tentu tidak akan bertahan selamanya, ada kalanya tokoh tersebut sudah tidak mampu lagi menjadi mesin penggerak partai. Oleh sebab itu sebuah partai politik yang terlembaga harus memiliki regenerasi yang bisa tercapai apabila partai memiliki sistem kaderisasi yang bagus sehingga mampu menghasilkan kaderkader baru yang berkualitas sebagai generasi penerus partai di masa depan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang telah peneliti sampaikan pada bagian pembahasan peneliti menarik kesimpulan bahwa PKB masih belum bisa dikatakan sebagai sebuah partai yang terlembaga berdasarkan pada keempat aspek pelebagaan menurut Randall dan Svasand. Terdapat dua point utama yang dapat disimpulkan dalam pelebagaan PKB di era Muhaimin Iskandar. 1) Pertama, PKB di era Muhaimin Iskandar dalam proses penentuan kebijakankebijakan strategis dalam internal partai masih terdapat intervensi yang cukup kuat dari pusat, sehingga mengindikasikan bahwa PKB di era Muhaimin Iskandar sebagai “Partai Komando”. 2) Kedua, besarnya peran ketokohan Muhaimin Iskandar sebagai mesin politik utama partai serta memiliki andil besar dalam menentukan garis besar haluan partai. Sehingga PKB terindikasi sebagai “personalistic party”. Partai yang terlembaga menurut Randall dan Svasand seharusnya adalah partai politik yang menjalankan roda organisasinya sesuai dengan konstitusi partai yang berlaku (AD/ART) serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis. Selain itu, terdapat peran seorang tokoh sentral juga masih sangat kuat yakni Muhaimin Iskandar dalam menentukan garis haluan partai, sehingga menjadikan PKB sebagai partai politik yang dapat diidentikkan sebagai personalistic party. Sedangkan untuk kedua aspek lainnya yakni identitas nilai dan reifikasi sudah lebih banyak indikator pelebagaan yang telah terpenuhi oleh PKB di era Muhaimin Iskandar, walaupun masih ada beberapa kekurangan pada masing-masing aspek yang ada. Berdasarkan deskripsi dari masing-masing indikator pelebagaan partai politik menurut Randall dan Svasand di atas maka peneliti juga menyimpulkan bahwa tingkat pelebagaan yang dimiliki PKB sangat dipengaruhi oleh ketokohan Muhaimin Iskandar. Akan tetapi dalam konteks pemilu dan kontestasi politik, ketokohan Muhaimin Iskandar yang sangat melekat menjadi sebuah keuntungan kompetitif bagi caleg-caleg dan calon kandidat yang berasal dari PKB. Sehingga mereka secara tidak langsung akan lebih mudah diterima di tengah masyarakat dengan memanfaatkan politik simbol dari ketokohan sosok Muhaimin Iskandar.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin, M. F. (2016). Electoral System and Party Dimension Assessment in Democratic Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 20(1), 1-15.
- Admojo, T. (2016). Peran Partai Oposisi di Parlemen Pasca Pemilu Presiden 2014. *Jurnal Politik*, 1(2), 283-315.
- Archer, M (1996) *Realist Social Theory: the morphogenetic approach*. Cambridge University
- Budiardjo (Ed). *Partisipasi dan Partai Politik, Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Gramedia.
- Budi, A. (2013). Membongkar Veto Player dalam Politik Kepartaian Indonesia Menuju Pemilu 2014. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 17(1), 51-66.
- Chindy Astria Octaviana Hutagalung. 2017. *Peran Partai Golkar Dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Masyarakat Berdasarkan Ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012*. Under Graduates Thesis, Universitas Negeri Semarang
- Crotty, W. (1993). Notes on the Study of Political Parties in the Third World. *American Review of Politics*, 14, 659-694.
- Dwipayana, A. A. (2009). Demokrasi Biaya Tinggi: Dimensi Ekonomi dalam Proses Demokrasi Elektoral di Indonesia Pasca Orde Baru. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 12(3), 257-279.
- Firmansyah, T. (2019). Ratusan Kader PKS Kabupaten Tangerang Mengundurkan Diri. , *Republika.co.id*:
https://www.republika.co.id/berita/pxn1i6377/nasional/politik/19/09/10/pxlx3_2377-ratusan-kader-pks-kabupaten-tangerang-mengundurkan-diri
- Hamidi.2010. *Penelitian Dan Teori Komunikasi*. Malang: UMM Press. Hal .141

- Huntington, S. P. (1968). *Political Order in Changing Societies*. London: Yale University Press.
- Haughton, T., & Deegan-Krause, K. (2015). Hurricane Season: Systems of Instability in Central and East European Party Politics. *East European Politics and Societies*, 29(1), 61-80
- Hidayat, S. (2017). An Islamic Party in Urban Local Politics: The PKS Candidacy at the 2012 Jakarta Gubernatorial Election. *Jurnal Politik*, 2(1), 5-40
- Imansyah, T. (2012). Regulasi partai politik dalam mewujudkan penguatan peran dan fungsi kelembagaan partai politik. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(3), 375-395.
- John Cresswell, *Research Design; Qualitative and Quantitative Approaches*, London, Sage Publication, 1994, hal 145.
- Kresna, M. (2018). Konflik Internal PKS: Membuka Lagi Faksi Keadilan & Faksi Sejahtera , [tirto.id: https://tirto.id/konflik-internal-pks-membuka-lagi-faksi-keadilan-](https://tirto.id/konflik-internal-pks-membuka-lagi-faksi-keadilan-).
- M. Amien Rais, *Demokrasi dan Proses Politik*, Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, Jakarta, 1986, hal.159
- Mahfud MD. 1993. *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Yogyakarta. Liberty. Hal 19
- Mahardika, A. G. (2019). Penerapan Pemilihan Pendahuluan Sebagai Upaya Menciptakan Pelembagaan Partai Politik yang Demokratis. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 4(2), 122-132
- Mainwaring, S., & Scully, T. (1995). *Building Democratic Institutions: Party Systems in Latin America*: Stanford: Stanford University Press.
- Muhtadi, B. (2013). Politik uang dan dinamika elektoral di Indonesia: Sebuah kajian awal interaksi antara “Party-ID” dan Patron-Klien. *Jurnal Penelitian Politik*, 10(1), 41-57.
- Neumann, Sigmund. 1981. *Ke Arah Suatu Studi Perbandingan Partai Politik*, Dalam Miriam Pangabean, Riana. 2004. *Membangun paradigm baru dalam mengembangkan UKM*. Jakarta. Press Giddens, Anthony (1992) *Human Societies A Reader*. Polity Press Cambridge Hall, Peter and Taylor R. C. R. (1996) ‘Political Science and the Three New Institutionalisms’, *Political Studies*, 44 (5) Lipietz, Alain. (1986) “Behind the Crisis: The Exhaustion of a Regime of Accumulation”. *Review of Radical Political Economics* 18 (1&2) North, Douglass C. (1990) *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge: Cambridge University Press Peters, B. Guy (2004) *Institutional Theory Political Science: The New Institutionalism*. New York .Continuum Rika (2010) *Change or Continuity? Rethinking Neoliberal Trajectory amidst Regime Change in Indonesia*. Den Haag: ISS Research Paper
- Parsons, Wayne. 2011. *Public Policy, pengantar teori dan praktik analisa kebijakan*, Kencana (Prenada Media Grup). Jakarta.
- Randall, V., & Svasand, L. (2002). Party Institutionalization in New Democracies. *Party Politics*, 8(1), 5-29
- Roberts, K. M. (2017). State of the Field: Party Politics in Hard Times: Comparative Perspectives on the European and Latin American Economic Crises. *European Journal of Political Research*, 56(2), 218-233.
- Romli, L. (2016). Masalah Kelembagaan Partai Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru. *Jurnal Penelitian Politik*, 5(1), 21-30
- Sihidi, I. T., Khanifah, L. N., & Romadhan, A. A. (2019). Relasi Politik Uang dan Party-ID di Indonesia. *Cosmogov*, 5(2), 204-220.
- Tan, P. J. (2002). Anti-Party Reaction in Indonesia: Causes and Implications. *Contemporary Southeast Asia*, 484-508.
- Thomas Meyer, 2008, *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis*, Friedrich Ebert Stiftung (FES), 43
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Edisi 2. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Wibowo, Aris Tri. 2014. *Peran Partai Politik Golkar Dalam Pendidikan Politik (Studi Kasus Di Dpd Partai Golkar Kabupaten Sragen)*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Wonka, A. (2016). The Party Politics of the Euro Crisis in the German Bundestag: Frames, Positions and Salience. *West European Politics*, 39(1), 125-144.

- Winters, J. A. (2011). *Oligarki*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Vasilopoulou, S. (2018). The Party Politics of Euroscepticism in Times of Crisis: The Case of Greece. *Politics*, 38(3), 311-326.
- Yumitro, G. (2013). Partai Islam dalam Dinamika Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 17(1), 35-50